

**HIJRAH KE KAMPUNG:
DAKWAH MUHAMMADIYAH DAN TRANSFORMASI SOSIAL DESA SARUDE
(1951-2021)**

**MOVE TO THE COUNTRYSIDE:
MUHAMMADIYAH'S DA'WAH AND SOCIAL TRANSFORMATION IN SARUDE
VILLAGE (1951-2021)**

Sail

Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama – Palu
Surel: sailshum31@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejarah masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di Desa Sarude, Sulawesi Barat, sejak 1951 hingga 2021, dengan memandang Muhammadiyah bukan semata sebagai organisasi keagamaan normatif, melainkan sebagai praktik dakwah dan kerja sosial yang beroperasi dalam konteks lokal pedesaan. Berangkat dari migrasi delapan muballigh Muhammadiyah dari Lumbudolo (Donggala) pada awal 1950-an, penelitian ini menelusuri bagaimana dakwah Muhammadiyah dijalankan melalui pembukaan kampung, pengelolaan ekonomi pertanian, pendirian surau, serta upaya memberantas praktik keagamaan yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada sumber lisan, arsip lokal, dan literatur tentang gerakan Islam Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan Muhammadiyah di Sarude tidak hanya ditentukan oleh ajaran purifikasi, tetapi oleh kemampuannya beradaptasi dengan struktur sosial desa, membangun otoritas moral, dan menjadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi ini berkontribusi pada historiografi Muhammadiyah dengan menempatkan desa sebagai arena penting produksi sejarah gerakan Islam, sekaligus menantang pembacaan yang terlalu berpusat pada elite dan institusi formal.

Kata kunci: Muhammadiyah; dakwah; sejarah sosial; masyarakat desa; Sulawesi Barat

Abstract

This article examines the history of Muhammadiyah's presence and development in Sarude Village, West Sulawesi, from 1951 to 2021 by conceptualizing Muhammadiyah not merely as a normative Islamic organization, but as a form of local preaching (dakwah) and social practice embedded in a rural context. Departing from the migration of eight Muhammadiyah preachers from Lumbudolo (Donggala) in the early 1950s, the study traces how Muhammadiyah's dakwah was carried out through village formation, agrarian economic activities, the establishment of prayer houses (surau), and efforts to reform religious practices considered incompatible with Islamic teachings. Using a historical method based on oral sources, local archives, and relevant literature on Islamic movements in Indonesia, this article demonstrates that Muhammadiyah's consolidation in Sarude was not determined solely by its purificatory doctrine, but by its ability to adapt to village social structures, build moral authority, and integrate dakwah into everyday life. This study contributes to the historiography of Muhammadiyah by positioning the village as a crucial arena for the production of Islamic movement history, while challenging elite- and institution-centered narratives that dominate existing scholarship.

Keywords: Muhammadiyah; dakwah; social history; rural society; West Sulawesi

PENDAHULUAN

Kajian tentang Muhammadiyah dalam historiografi Indonesia selama ini didominasi oleh dua kecenderungan utama. Pertama, penulisan yang menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis dengan penekanan pada ideologi, struktur kelembagaan, dan peran elite nasionalnya.¹ Kedua, studi yang menyoroti Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi agama dengan fokus pada agenda pemberantasan praktik keagamaan lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.² Kedua pendekatan tersebut, meskipun penting, cenderung mengabaikan satu pertanyaan mendasar: bagaimana Muhammadiyah bekerja dan beroperasi dalam konteks sosial pedesaan sebagai praktik keseharian, bukan sekadar sebagai organisasi normatif?

Artikel ini berangkat dari kritik terhadap kecenderungan historiografi yang terlalu berpusat pada kota, elite, dan institusi formal. Dengan menempatkan desa sebagai arena sejarah, tulisan ini memandang Muhammadiyah bukan semata-mata sebagai entitas organisasi, melainkan sebagai praktik dakwah dan kerja sosial yang dijalankan dalam relasi konkret dengan struktur sosial lokal. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi sejarah sosial yang menekankan pentingnya praktik, pengalaman, dan relasi keseharian dalam memahami proses sejarah.³

Desa Sarude di Sulawesi Barat menawarkan konteks yang penting untuk membaca dinamika tersebut. Sejak awal 1950-an, desa ini menjadi lokasi migrasi delapan muballigh Muhammadiyah dari Lumbudolo (Donggala) yang tidak hanya membawa ajaran keagamaan, tetapi juga terlibat langsung dalam pembukaan kampung, pengelolaan ekonomi pertanian, serta pembentukan ruang ibadah dan pendidikan informal. Kehadiran Muhammadiyah di Sarude tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial pedesaan, tradisi keagamaan lokal, serta kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, dakwah tidak dapat dipahami semata sebagai transmisi ajaran, tetapi sebagai proses sosial yang dinegosiasikan secara terus-menerus.

Sejumlah studi tentang gerakan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah di tingkat lokal sering kali tidak ditentukan oleh kekuatan doktrin semata, melainkan oleh kemampuan aktor-aktornya untuk membangun otoritas moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴ Dakwah yang dilekatkan pada kerja ekonomi, pendidikan, dan praktik sosial cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan dakwah yang hanya beroperasi pada tataran simbolik

¹ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (Singapore: Oxford University Press, 1973), 89-95.

² Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1989), 112-18.

³ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 23-27.

⁴ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2011), 17-21.

dan ideologis. Perspektif ini membuka ruang untuk membaca Muhammadiyah di desa bukan sebagai agen konflik budaya semata, tetapi sebagai aktor historis yang terlibat dalam transformasi sosial pedesaan.

Dalam konteks Sarude, dakwah Muhammadiyah juga berhadapan dengan praktik keagamaan lokal yang telah mengakar. Upaya memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat—agenda klasik Muhammadiyah—tidak selalu dijalankan melalui konfrontasi terbuka, tetapi melalui strategi gradual yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa purifikasi agama di tingkat desa merupakan praktik yang kompleks dan kontekstual, jauh dari gambaran hitam-putih antara “Islam murni” dan “tradisi lokal”.⁵

Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial dan bertumpu pada sumber lisan, arsip lokal, serta literatur tentang gerakan Islam Indonesia, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana Muhammadiyah beroperasi sebagai praktik dakwah lokal di Desa Sarude sejak 1951 hingga 2021? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam pembahasan mengenai migrasi muballigh, pembentukan kampung dan ruang ibadah, relasi antara dakwah dan ekonomi agraria, serta batas-batas transformasi sosial yang dihasilkan oleh kehadiran Muhammadiyah. Melalui pembacaan ini, artikel ini berupaya berkontribusi pada historiografi Muhammadiyah dengan menggeser fokus dari narasi elite dan institusi formal menuju praktik keseharian dan pengalaman sosial di tingkat desa.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menganalisis kehadiran dan perkembangan Muhammadiyah di Desa Sarude sebagai praktik dakwah lokal yang beroperasi dalam konteks sosial pedesaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pembacaan terhadap Muhammadiyah bukan semata sebagai organisasi normatif, melainkan sebagai aktor historis yang membentuk dan dibentuk oleh relasi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat desa.⁶

Sumber utama penelitian ini terdiri atas sumber lisan, arsip lokal, dan literatur sekunder. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, muballigh, serta warga Desa Sarude yang terlibat langsung atau memiliki ingatan kolektif tentang fase awal masuknya Muhammadiyah sejak dekade 1950-an hingga perkembangannya pada masa berikutnya. Wawancara tidak diperlakukan sebagai fakta objektif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ingatan sosial yang merekam pengalaman, penafsiran,

⁵ Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, The Association for Asian Studies Monograph 45 (Tucson, Ariz: Univ. of Arizona Pr, 1989), 7–10.

⁶ Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 23–27.

dan makna yang dilekatkan aktor-aktor lokal terhadap praktik dakwah Muhammadiyah.⁷

Selain sumber lisan, penelitian ini memanfaatkan dokumen dan arsip lokal, seperti catatan organisasi Muhammadiyah tingkat desa dan kecamatan, dokumen pendirian surau dan kegiatan dakwah, serta arsip keluarga para muballigh perintis. Arsip-arsip tersebut digunakan untuk merekonstruksi kronologi kehadiran Muhammadiyah di Sarude dan untuk memverifikasi serta mengontekstualisasikan data lisan. Sumber tertulis dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan konteks produksi, kepentingan penulis, dan keterbatasan dokumentasi yang lazim ditemukan pada arsip komunitas.⁸

Tahap analisis dilakukan melalui kritik sumber dan interpretasi historis. Kritik sumber diterapkan baik terhadap sumber lisan maupun tertulis untuk menilai reliabilitas, posisi sosial informan, serta kemungkinan bias ingatan. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik dengan menelusuri pola-pola praktik dakwah, relasi antara dakwah dan ekonomi agraria, pembentukan otoritas moral, serta interaksi Muhammadiyah dengan praktik keagamaan lokal. Pendekatan tematik ini memungkinkan penulis menghubungkan temuan empiris dengan kerangka historiografis yang lebih luas tanpa mengaburkan kekhasan konteks Desa Sarude.⁹

Dengan metode ini, artikel tidak bertujuan menilai keberhasilan atau kegagalan Muhammadiyah secara normatif, melainkan untuk memahami bagaimana dakwah Muhammadiyah dijalankan, dinegosiasikan, dan dibatasi dalam kehidupan sosial desa. Pendekatan sejarah sosial yang digunakan diharapkan dapat memberikan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap dinamika gerakan Islam di tingkat lokal serta memperkaya historiografi Muhammadiyah yang selama ini didominasi oleh perspektif institusional dan elite.

PEMBAHASAN

Hijrah Muballigh, Pembentukan Kampung, dan Dakwah sebagai Praktik Sosial (1951–1970-an)

Sejarah kehadiran Muhammadiyah di Desa Sarude bermula pada tahun 1951, ketika delapan muballigh dari Desa Lumbudolo, Kabupaten Donggala, yakni H. Yotogau, Lamoga, Selogau, Laribu, Lawinco, Lagoci, Laceki, dan Langgido, melakukan hijrah ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Rojo. Hijrah ini tidak semata dimaksudkan sebagai ekspansi organisasi, melainkan sebagai praktik sosial

⁷ Alessandro Portelli, *The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, SUNY Series in Oral and Public History (Albany, N.Y: State University of New York Press, 1991), 50–55.

⁸ Ann Laura Stoler, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense* (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2009), 20–25.

⁹ Peter Burke, *What Is Cultural History?*, 2. ed., repr, *What Is History?* Series (Cambridge: Polity Press, 2010), 70–74.

yang menyatukan dua tujuan utama: perbaikan ekonomi dan dakwah keagamaan. Pola hijrah muballigh semacam ini lazim dijumpai dalam sejarah sosial Islam Indonesia pascakemerdekaan, ketika dakwah dijalankan bersamaan dengan pembukaan ruang hidup baru di wilayah pedesaan.¹⁰

Pada fase awal, Kampung Rojo merupakan kawasan hutan belantara yang kemudian dibuka melalui kerja agraria kolektif. Para muballigh berperan sebagai perintis dengan membuka kebun, sawah, dan hunian sederhana, yang sekaligus menjadi basis ekonomi komunitas. Keterlibatan langsung dalam kerja pertanian ini membangun legitimasi sosial dakwah Muhammadiyah, karena otoritas keagamaan dilekatkan pada etos kerja dan keteladanan hidup sehari-hari. Dalam kajian sejarah pedesaan, keterhubungan antara agama dan ekonomi agraria kerap menjadi fondasi penting keberhasilan dakwah lokal.¹¹

Seiring berkembangnya Kampung Rojo dan bertambahnya jumlah penduduk pada dekade 1960-an, hubungan sosial antara Rojo, Balabonda, dan Surumana terbentuk melalui praktik persaudaraan lintas komunitas. Interaksi ini menunjukkan bahwa pembentukan komunitas Muhammadiyah di Sarude tidak berlangsung secara eksklusif, melainkan terjalin dalam jaringan sosial yang lebih luas. Pola ini sejalan dengan temuan sejarah sosial yang menekankan bahwa komunitas keagamaan di tingkat desa sering berkembang melalui negosiasi sosial, bukan isolasi identitas.¹²

Dakwah Muhammadiyah mulai dijalankan secara lebih terstruktur setelah didirikannya surau sekitar tahun 1959. Surau berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan informal, musyawarah, dan konsolidasi sosial. Dalam historiografi Islam Indonesia, surau dan langgar kerap dipahami sebagai institusi kunci yang menjembatani ajaran normatif dan praktik sosial masyarakat.¹³

Pada fase awal dakwah, para muballigh Muhammadiyah di Sarude dikenal menerapkan agenda purifikasi agama yang relatif tegas, terutama dalam upaya memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat (TBC), serta praktik perjudian dan ritual adat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Namun, purifikasi ini tidak selalu dijalankan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui strategi simbolik dan edukatif yang bertujuan membangun batas moral komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa purifikasi agama di tingkat desa merupakan proses sosial yang dinegosiasikan, bukan sekadar penerapan doktrin secara sepihak.¹⁴

¹⁰ Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, 89-95.

¹¹ James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1977), 3-5, <https://doi.org/10.12987/9780300185553>.

¹² Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 23-27.

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 45-47.

¹⁴ Woodward, *Islam in Java*, 7-10.

Memasuki dekade 1970-an, seiring meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, orientasi dakwah Muhammadiyah di Sarude mengalami pergeseran dari agenda purifikasi yang keras menuju penekanan pada pembinaan akhlak dan penguatan praktik keislaman sehari-hari. Pergeseran ini memperlihatkan karakter dakwah Muhammadiyah yang adaptif dan kontekstual, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat desa. Dalam perspektif sejarah gerakan Islam, kemampuan beradaptasi semacam ini menjadi salah satu faktor keberlanjutan dakwah di tingkat lokal.¹⁵

Kaderisasi, Pendidikan, dan Reproduksi Dakwah Muhammadiyah di Desa Sarude (1970–1990-an)

Memasuki dekade 1970-an, dakwah Muhammadiyah di Desa Sarude mengalami transformasi penting dari fase perintisan menuju fase reproduksi dan pelembagaan sosial. Jika pada periode awal dakwah bertumpu pada hijrah muballigh dan pembentukan kampung, maka pada fase ini fokus bergeser pada kaderisasi, pendidikan, dan pembentukan kepemimpinan lokal sebagai strategi keberlanjutan gerakan. Perubahan ini menandai kesadaran bahwa dakwah tidak dapat bergantung selamanya pada figur perintis, melainkan harus direproduksi melalui generasi baru yang dibentuk secara sistematis.

Peran Amin, putra Lagoci—salah satu muballigh perintis—menjadi sentral dalam fase ini. Sejak sekitar 1970 hingga wafatnya pada 2012, Amin memimpin Ranting Muhammadiyah Kampung Rojo meskipun struktur organisasi pada masa itu belum terbentuk secara formal. Kepemimpinannya tidak bertumpu pada pendidikan formal yang tinggi, melainkan pada pengalaman panjang dalam aktivitas organisasi Muhammadiyah serta jaringan relasi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Palu dan Yogyakarta. Dalam konteks sejarah sosial, figur seperti Amin merepresentasikan otoritas lokal berbasis kepercayaan sosial, bukan legitimasi birokratis.¹⁶

Salah satu praktik kunci dalam fase ini adalah pelaksanaan Training Center (TC) sejak awal 1970-an. Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang kaderisasi terbuka, tidak hanya bagi anggota Muhammadiyah, tetapi juga masyarakat umum. Materi pengkaderan diarahkan pada penguatan pemahaman keislaman, pembentukan mental sosial, dan pengenalan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, bukan sekadar organisasi. Keterbukaan TC terhadap masyarakat umum menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Sarude memilih strategi inklusif untuk memperluas basis sosialnya. Pola kaderisasi semacam ini sejalan dengan praktik gerakan Islam modernis yang menempatkan pendidikan kader sebagai fondasi keberlanjutan dakwah.¹⁷

¹⁵ Hefner, *Civil Islam*, 17–21.

¹⁶ Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 23–27.

¹⁷ Alfian, *Muhammadiyah*, 112–18.

Puncak strategi kaderisasi terjadi ketika Lukman, putra Laribu, diutus untuk menempuh pendidikan di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada 1973. Pengiriman kader ke pusat pendidikan Muhammadiyah ini merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dakwah di tingkat lokal. Setelah menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Sarude pada awal 1980-an, Lukman tidak hanya melanjutkan dakwah, tetapi juga membawa dua rekannya—Hasyim dari Jawa Timur dan Asgar dari Yogyakarta—untuk memperkuat kegiatan pendidikan dan pengajaran agama di Kampung Rojo. Praktik ini menunjukkan adanya sirkulasi kader antara pusat dan daerah, yang menjadi ciri penting gerakan Muhammadiyah.¹⁸

Pada periode ini pula didirikan sekolah agama nonformal di Masjid Al-Muhajirin Rojo sekitar 1985, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang SMP. Sekolah ini menggunakan kurikulum Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan menekankan pembelajaran ibadah, akhlak, serta baca-tulis Al-Qur'an. Meskipun tidak menghasilkan ijazah resmi dan dijalankan tanpa imbalan materi, sekolah ini berfungsi sebagai ruang transmisi nilai dan kaderisasi keagamaan. Dalam perspektif sejarah pendidikan Islam, praktik pendidikan nonformal semacam ini sering menjadi tulang punggung dakwah di wilayah pedesaan yang akses pendidikannya terbatas.¹⁹

Selain di Kampung Rojo, upaya pendidikan dan dakwah juga diperluas ke Balabonda dan kembali ke Lumbudolo. Beberapa murid yang menunjukkan minat dan kapasitas kemudian dikirim untuk melanjutkan pendidikan ke Muallimin Yogyakarta, membentuk siklus kaderisasi berlapis. Namun, keberhasilan fase ini juga menyimpan kerentanan. Ketergantungan yang tinggi pada figur-figur kunci seperti Lukman, Hasyim, dan Asgar membuat keberlanjutan kegiatan sangat rentan terhadap perubahan personal. Ketika Lukman berpindah ke Parigi pada awal 1990-an dan Hasyim kembali ke Yogyakarta sekitar 1995, kegiatan pendidikan dan dakwah di Sarude mulai mengalami penurunan.

Penurunan ini diperparah oleh perubahan struktur sosial: berkembangnya sekolah-sekolah umum, meningkatnya mobilitas pendidikan ke kota, serta berkurangnya generasi muda yang menetap di Kampung Rojo. Dakwah Muhammadiyah pada fase ini menghadapi tantangan regenerasi, karena mekanisme reproduksi kader tidak lagi berjalan seintensif sebelumnya. Dalam kajian sejarah gerakan sosial, fase stagnasi semacam ini lazim terjadi ketika pelembagaan tidak diiringi oleh regenerasi yang konsisten.²⁰

¹⁸ Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, 89–95.

¹⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), 95–98.

²⁰ Joshua Barker dan Gerry van Klinken, ed., *State of Authority: State in Society in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018), 1–6, <https://doi.org/10.7591/9781501719448>.

Dengan demikian, periode 1970–1990-an menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah di Desa Sarude dijalankan melalui pendidikan dan kaderisasi sebagai praktik sosial, bukan sekadar penguatan struktur organisasi. Keberhasilan membangun generasi kader lokal sekaligus mengungkap batas-batas dakwah yang terlalu bergantung pada figur sentral. Pembacaan ini menegaskan bahwa keberlanjutan gerakan Islam di tingkat desa sangat ditentukan oleh kemampuan mereproduksi kepemimpinan dan pengetahuan keagamaan secara berkelanjutan.

Stagnasi, Restrukturisasi, dan Kebangkitan Kembali Dakwah Muhammadiyah di Desa Sarude (1990–2021)

Memasuki dekade 1990-an, dakwah Muhammadiyah di Desa Sarude mengalami fase stagnasi struktural dan kultural. Fase ini tidak dapat dipahami sebagai kegagalan dakwah semata, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan sosial yang signifikan di tingkat desa. Setelah Lukman berpindah ke Parigi pada awal 1990-an dan Hasyim kembali ke Yogyakarta sekitar 1995, kegiatan pendidikan dan dakwah yang sebelumnya menjadi tulang punggung Muhammadiyah di Kampung Rojo mulai melemah. Ketergantungan yang tinggi pada figur-figur sentral menyebabkan terhentinya reproduksi kader dan melemahnya kepemimpinan lokal.

Stagnasi ini diperparah oleh transformasi sistem pendidikan dan mobilitas sosial. Sejak pertengahan 1990-an, sekolah-sekolah umum mulai berkembang di sekitar Sarude, sehingga generasi muda tidak lagi bergantung pada pendidikan keagamaan nonformal yang diselenggarakan Muhammadiyah. Banyak anak muda melanjutkan pendidikan ke Palu dan kota-kota lain, yang berdampak pada berkurangnya aktor lokal yang dapat melanjutkan kegiatan dakwah. Dalam perspektif sejarah sosial, situasi ini menunjukkan bagaimana perubahan struktur pendidikan dan urbanisasi dapat menggeser peran lembaga keagamaan lokal dalam kehidupan masyarakat desa.²¹

Pada periode ini, kegiatan Muhammadiyah di Sarude tidak sepenuhnya hilang, tetapi bertahan dalam bentuk aktivitas simbolik dan sporadis, seperti Training Center (TC), halal bihalal, dan kegiatan insidental yang dipandu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dari luar daerah. Namun, absennya struktur organisasi yang jelas membuat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berkelanjutan. Hingga sekitar tahun 2013, Muhammadiyah di Sarude lebih tepat dipahami sebagai dakwah kultural tanpa kelembagaan formal, karena secara administratif masih bergantung pada struktur Muhammadiyah di Lumbudolo, Donggala, Sulawesi Tengah.

Titik balik penting terjadi setelah terbentuknya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Pasangkayu pada 2015. Pembentukan cabang ini mendorong restrukturisasi Muhammadiyah di tingkat desa, termasuk pembentukan Ranting Muhammadiyah Desa Sarude sebagai bagian dari Kecamatan Sarjo.

²¹ Karl Mannheim, *Collected Works. 5: Essays on the Sociology of Knowledge*, Digital repr (Abingdon: Routledge, 2007), 286–87.

Restrukturisasi ini menandai peralihan dakwah Muhammadiyah dari praktik informal menuju pelembagaan organisasi yang lebih sistematis. Kepemimpinan ranting pada periode ini—dengan figur seperti Hastan sebagai ketua—mencerminkan munculnya generasi baru aktor dakwah yang berupaya menghidupkan kembali kegiatan keagamaan yang sempat terhenti.

Restrukturisasi organisasi membawa dampak nyata terhadap intensitas kegiatan dakwah. Sejak 2015, berbagai kegiatan kembali diaktifkan, termasuk pengajian rutin, tadarusan ibu-ibu Aisyiyah, serta program kaderisasi yang sebelumnya dikenal sebagai Training Center dan kemudian diadaptasi menjadi Taruna Melati (TM). Perubahan nomenklatur dan struktur kaderisasi ini mencerminkan penyesuaian Muhammadiyah Sarude terhadap kebijakan organisasi yang lebih luas, sekaligus upaya memperbarui metode kaderisasi agar sesuai dengan konteks generasi muda.²²

Pada periode ini pula Muhammadiyah Sarude mulai mengembangkan kembali amal usaha pendidikan, ditandai dengan pendirian TK Aisyiyah Bustanul Atfal pada 2017. Kehadiran lembaga pendidikan ini menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah kembali diarahkan pada strategi jangka panjang melalui pendidikan anak usia dini. Namun, keberlanjutan amal usaha tersebut tetap menghadapi tantangan, terutama terkait perizinan dan keterbatasan sumber daya. Fakta bahwa TK Aisyiyah Bustanul Atfal hanya beroperasi hingga 2021 memperlihatkan bahwa pelembagaan dakwah di tingkat desa tetap rentan terhadap faktor administratif dan struktural di luar kontrol komunitas lokal.

Pandemi COVID-19 pada 2020–2021 kembali menguji ketahanan dakwah Muhammadiyah di Sarude. Banyak kegiatan rutin terhenti, termasuk kaderisasi dan pengajian. Namun, berbeda dengan fase stagnasi sebelumnya, kegiatan Muhammadiyah relatif cepat diaktifkan kembali setelah pandemi mereda. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi pasca-2015 telah menciptakan basis kelembagaan yang lebih resilien, meskipun masih terbatas.

Dengan demikian, periode 1990–2021 memperlihatkan dinamika dakwah Muhammadiyah di Sarude sebagai proses yang tidak linear: mengalami stagnasi, beradaptasi, lalu bangkit kembali melalui restrukturisasi organisasi. Pembacaan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dakwah Muhammadiyah di tingkat desa sangat bergantung pada keseimbangan antara kepemimpinan lokal, kaderisasi berkelanjutan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Muhammadiyah di Sarude tidak sekadar bertahan sebagai organisasi, tetapi terus dinegosiasikan sebagai praktik sosial yang hidup dalam konteks sejarah lokal.

²² Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c. 1910-2010* (S.I.: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), 146–50.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kehadiran dan perkembangan Muhammadiyah di Desa Sarude sejak 1951 hingga 2021 tidak dapat dipahami semata sebagai ekspansi organisasi keagamaan, melainkan sebagai praktik dakwah dan kerja sosial yang beroperasi dalam konteks sejarah pedesaan yang dinamis. Hijrah delapan muballigh dari Lumbudolo ke Kampung Rojo menandai fase awal dakwah Muhammadiyah yang menyatukan perbaikan ekonomi dan pembaruan keagamaan, sekaligus membentuk ruang sosial baru melalui pembukaan kampung, kerja agraria, dan pendirian surau. Pada fase ini, dakwah dijalankan sebagai praktik hidup bersama, bukan sebagai proyek ideologis yang terpisah dari kebutuhan material masyarakat.

Memasuki periode 1970–1990-an, Muhammadiyah di Sarude memperlihatkan upaya serius untuk mereproduksi dakwah melalui kaderisasi dan pendidikan. Pengiriman kader ke Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, penyelenggaraan Training Center, serta pendirian sekolah agama nonformal menjadi strategi utama untuk membangun kepemimpinan lokal dan memastikan keberlanjutan gerakan. Namun, fase ini juga mengungkap batas-batas dakwah yang terlalu bergantung pada figur sentral. Ketika aktor kunci berpindah atau tidak lagi aktif, kegiatan dakwah mengalami penurunan, menunjukkan rapuhnya reproduksi sosial yang tidak sepenuhnya terlembagakan.

Periode 1990–2021 menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah di Sarude bersifat tidak linear. Stagnasi yang terjadi pada dekade 1990-an hingga awal 2010-an dipengaruhi oleh perubahan struktur pendidikan, mobilitas sosial, dan ketiadaan kepengurusan formal. Kebangkitan kembali pasca-2015, melalui pembentukan Ranting Muhammadiyah Desa Sarude dan pengembangan kaderisasi serta amal usaha pendidikan, memperlihatkan pentingnya pelembagaan organisasi dalam menopang keberlanjutan dakwah. Meski demikian, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pelembagaan pun tetap rentan terhadap faktor eksternal, sehingga ketahanan dakwah sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur organisasi dan praktik sosial di tingkat lokal.

Secara historiografis, artikel ini berkontribusi dengan menggeser kajian Muhammadiyah dari narasi elite dan institusional menuju sejarah praktik sosial di tingkat desa. Dengan menempatkan Sarude sebagai arena sejarah, tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan, stagnasi, dan kebangkitan Muhammadiyah ditentukan oleh negosiasi keseharian antara dakwah, ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial lokal. Temuan ini menantang pembacaan yang melihat gerakan Islam modernis sebagai entitas yang bekerja secara seragam di berbagai konteks, serta menekankan pentingnya pendekatan sejarah sosial untuk memahami dinamika gerakan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Barker, Joshua, dan Gerry van Klinken, ed. *State of Authority: State in Society in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018.
<https://doi.org/10.7591/9781501719448>.
- Burke, Peter. *What Is Cultural History?* 2. ed., Repr. *What Is History?* Series. Cambridge: Polity Press, 2010.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Karel A. Steenbrink. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mannheim, Karl. *Collected Works. 5: Essays on the Sociology of Knowledge*. Digital repr. Abingdon: Routledge, 2007.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c. 1910-2010*. S.l.: Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Singapore: Oxford University Press, 1973.
- Portelli, Alessandro. *The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. SUNY Series in Oral and Public History. Albany, N.Y: State University of New York Press, 1991.
- Scott, James C. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press, 1977.
<https://doi.org/10.12987/9780300185553>.
- Stoler, Ann Laura. *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2009.
- Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. The Association for Asian Studies Monograph 45. Tucson, Ariz: Univ. of Arizona Pr, 1989.